

**ADVOKASI HAK-HAK DASAR BURUH GENDONG PEREMPUAN
OLEH YAYASAN ANNISA SWASTI (YASANTI) DI PASAR GIWANGAN
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1

Disusun Oleh :

Laras Tiyan Permatasari

NIM 15250040

Pembimbing:

Andayani, S.IP., MSW.

NIP. 19721016 199903 2 008

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-124/Un.02/DD/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : ADVOKASI HAK-HAK DASAR BURUH GENDONG PEREMPUAN OLEH
YAYASAN ANNISA SWASTI (YASANTI) DI PASAR GIWANGAN
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LARAS TIYAN PERMATASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 15250040
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Andayani, SIP, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Penguji II

Drs. H. Suisyanto, M.Pd
NIP. 19560704 198603 1 002

Penguji III

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 19830519 200912 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Drs. H. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19580310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laras Tiyan Permatasari

NIM : 15250040

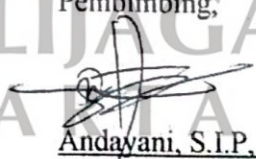
Judul Skripsi : Advokasi Hak-Hak Dasar Buruh Gendong Perempuan Oleh Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Pasar Giwangan Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

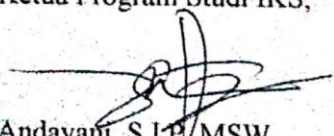
Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Januari 2020
Pembimbing,


Andayani, S.I.P, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Mengetahui,
Ketua Program Studi IKS,


Andayani, S.I.P, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Tiyan Permatasari
NIM : 15250040
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Advokasi Hak-Hak Dasar Buruh Gendong Perempuan Oleh Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Pasar Giwangan Yogyakarta”**, adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali dengan tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Januari 2020

Yang menyatakan,



Laras Tiyan Permatasari

NIM. 15250040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa berdasarkan QS. An-Nur Ayat 31 dan QS. Al-Ahzab Ayat 54, maka saya:

Nama : Laras Tiyan Permatasari

NIM : 15250040

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Desa Adisana Rt. 09/Rw. 01 Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes Jawa Tengah 52273

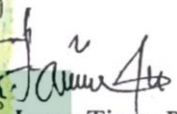
Menyatakan dan menyajikan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila dikesudahan hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya bersedia menanggung semua akibatnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 3 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,




Laras Tiyan Permatasari

NIM. 15250040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahanda Abdullah Imam dan Ibunda Lisma Boti

Mbah Syatori dan Mbah Syati'ah

Kepada seluruh keluarga besarku, yang tidak ada lelahnya memberikan dukungan dan bantuan kepadaku.

Kepada Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

**Kepada setiap insan yang tanpa pamrih menyelipkan namaku dalam doanya.
Semoga apa yang kalian lakukan menjadi ladang amal dan dibalas kebaikan oleh Allah SWT. Aamiin.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat bagi manusia lain.

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani

di dalam Shahihul Jami' no: 3289)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala pertolongan dan kemudahan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabiullah Muhammad Saw, yang telah menerangi dan memberikan tuntunan arah kebaikan kepada ummat muslimin.

Usaha dan upaya telah penulis perjuangkan dalam penyusunan skripsi ini, agar hasilnya dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Penulis sangat bersyukur karena telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, ***Advokasi hak-hak Dasar Buruh Gendong Perempuan Oleh Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Pasar Giwangan Yogyakarta*** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dan campur tangan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT. dan:

1. Andayani, S.IP., MSW, selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah dengan sabar dan telaten membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

2. Aryan Torrido, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dari semester awal hingga penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Staf dan Dosen Pengampu Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman berharga selama perkuliahan.
4. Seluruh Staf dan Pengurus Yayasan Annisa Swasti Yogyakarta, Ibu Umi Asih, Ibu Amin Muftiyanah, Ibu Nur Hardini, Ibu Hikmah Diniah yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam kepenulisan skripsi ini.
5. Seluruh Buruh Gendong Pasar Giwangan Yogyakarta, terutama Ibu Suratmi, Ibu Rubiyah, Ibu Bandiyah, Ibu Yantinem dan kawan-kawan buruh gendong lainnya yang telah merelakan waktu kerja dan istirahatnya demi berbagi pengalaman dengan penulis.
6. Keluargaku, Bapa, Mama, Mbah Kakung, Mbah Uti, Almh. Buyut Saojah, Lik Indah, Lik Pikoh, Lik Ning, Om Hendrik, Made El, Pak uwo, Mak uwo, Ka Fera, Ka Liska, Ka Okis, Ka Oji, adikku Fitri, Dimas, dan Cindy yang telah mendoakan, memberikan motivasi dan selalu membuat semangat penulis untuk menyelesaikan karya ini.
7. Teman-temanku, Meiga, Ayu, Mey, Umni, Anisah, Aris, Nadya, Devi, Anida, Tata, dan Santi yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.

8. Keluarga KKN 123 Serut, Erlina, Iphat, Lutfia, Hida, Nia, Fais, Andi, Iqbal, Basit, Ibu Purwaningsih, Bapak Sarjono, Angga, Intan, dan seluruh warga masyarakat Dukuh Serut Rt. 04, 05, 06, dan 07 Desa Serut, Gedangsari, Gunungkidul.
9. Sahabat Masjid angkatan 2017, Takmir dan Pembimbing Labortorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah mengajarkan banyak pengalaman dan ilmu yang berharga dalam berorganisasi.
10. Seluruh teman-teman IKS 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam karya ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Walaupun karya ini masih jauh dari kata sempurna, Penulis tetap berharap karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Januari 2020

Penyusun

Laras Tiyan Permatasari
NIM. 15250040

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Advokasi Hak-Hak Dasar Buruh Gendong Perempuan Oleh Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Pasar Giwangan Yogyakarta. Advokasi dilatarbelakangi oleh adanya berbagai persoalan yang dihadapi oleh buruh gendong akibat dari belum diakuinya profesi buruh gendong sehingga membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan hak-haknya. Yasanti hadir untuk membantu buruh gendong berjuang dalam mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan pekerja melalui tindakan advokasi.

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang adalah Teori Tinjauan tentang Advokasi dan Tinjauan Hak-Hak Pekerja Informal. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, model data dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Uji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan melalui tiga langkah. *Pertama*, membentuk lingkaran inti advokasi. *Kedua*, menentukan isu strategis. *Ketiga*, strategi advokasi yang terbagi menjadi empat bagian, yaitu: membangun basis gerakan, membangun jaringan, membentuk opini publik dan melakukan lobi kepada pemerintah. Advokasi yang telah dilakukan sampai saat ini memang belum menghasilkan tujuan utama yaitu produk hukum yang melindungi buruh gendong. Akan tetapi, perjalanan Yasanti dalam mendampingi buruh gendong telah meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, Yasanti sebagai LSM telah membantu buruh gendong dalam pemenuhan hak-haknya sebagai perempuan pekerja.

Kata Kunci: *Advokasi, Strategi, Yayasan Annisa Swasti, Buruh Gendong, Hak Dasar Pekerja.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Pembahasan	38

BAB II GAMBARAN UMUM YASANTI DAN BURUH GENDONG

DI PASAR GIWANGAN..... 41

A. Profil Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) 41

1. Sejarah Yayasan Annisa Swasti 41

2. Visi 44

3. Misi..... 44

4. Dinamika Struktur Organisasi..... 44

5. Kelompok Dampingan Yasanti..... 51

6. Jaringan Kerjasama 51

B. Profil Buruh Gendong Pasar Giwangan 56

1. Gambaran Umum Pasar Giwangan..... 56

2. Keberadaan Buruh Gendong di Pasar Giwangan..... 61

BAB III ADVOKASI HAK-HAK DASAR BURUH GENDONG OLEH

YAYASAN ANNISA SWASTI DI PASAR GIWANGAN 69

A. Lingkaran Inti Advokasi 69

1. Bermula dari Proyek Penelitian Menjadi Pendampingan..... 69

2. Membentuk Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong 74

B. Isu Strategis 81

1. Persoalan Buruh Gendong..... 81

2. Sasaran Advokasi..... 87

C. Strategi Advokasi..... 88

1. Membangun Basis Gerakan..... 88

2. Membangun Jaringan 100

3. Membentuk Opini Publik	105
4. Melakukan Lobbi Kepada Pemerintah	109
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Usia Buruh Gendong di Pasar Giwangan.....	2
Tabel 2.1 Wilayah Dampingan Yasanti.....	48
Tabel 2.2 Karakteristik Pasar Giwangan Yogyakarta	58
Tabel 2.3 Fasilitas Pasar Giwangan Yogyakarta.....	59
Tabel 2.4 Buruh Gendong Bagian Buah di Pasar Giwangan.....	63
Tabel 2.5 Buruh Gendong Bagian Sayur di Pasar Giwangan.....	64
Tabel 3.1 Nama-Nama Pelaksana Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong..	79
Tabel 3.2 Daftar Peserta Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong.....	80
Tabel 3.3 Hasil Pemetaan Masalah Buruh Gendong.....	81
Tabel 3.4 Peraturan Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong DIY	98
Tabel 3.5 Kepengurusan Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong DIY	101
Tabel 3.6 Daftar Buruh Gendong Pasar Giwangan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Yayasan Annisa Swasti Periode 2016-2020	50
Gambar 2.2	Denah Pasar Induk Buah dan Sayur Giwangan	56
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong Pasar Giwangan Periode 2019-2022	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar Giwangan merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat grosir buah dan sayur di DIY. Pasar ini merupakan satu-satunya pasar induk yang buka selama 24 jam dengan arus kepadatan distribusi barang (buah dan sayur) yang tinggi. Aktivitas tertinggi terjadi justru pada sore hari sampai menjelang pagi. Buah dan sayuran di suplai dari petani atau tengkulak dalam kuantitas yang besar.

Pedagang di Pasar Giwangan terbagi menjadi dua, yaitu pedagang yang melayani pembelian barang secara grosir; dan pedagang yang melayani pembelian barang secara eceran. Oleh karena itu, jasa angkut menjadi sangat diperlukan di pasar ini. Para pedagang maupun pembeli membutuhkan jasa angkut untuk membantu mereka memindahkan barang (buah dan sayur) dari tempat satu ke tempat lainnya. Peluang kerja tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh kaum laki-laki, tetapi banyak perempuan yang juga menjajakan jasa angkut kepada para pedagang ataupun pembeli. Para perempuan ini sering disebut dengan istilah “buruh gendong”.

Buruh gendong merupakan salah satu representasi pekerjaan perempuan di sektor informal. Para perempuan ini bekerja menjual jasa mereka dengan cara mengangkut (menggendong) barang bawaan atau

belanjaan seseorang menggunakan kain atau *jarit*. Perempuan buruh gendong adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih karena pekerjaan ini tidak membutuhkan pendidikan ataupun pelatihan terlebih dahulu.

Buruh gendong di Pasar Giwangan tahun 2019 berjumlah 135 orang. Mereka berasal dari dua propinsi, yaitu Jawa Tengah dan DIY, yang meliputi: Gunung Kidul, Bantul, Kulonprogo, Sleman, Yogyakarta, Purworejo, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, dan Karanganyar.¹ Buruh gendong di Pasar Giwangan terbagi menjadi beberapa *shift* kerja, yaitu pagi-siang; siang-malam; pagi-malam; dan ada yang bekerja pada waktu malam saja.² Perempuan yang menjadi buruh gendong di Pasar Giwangan rata-rata berusia dewasa sampai usia lanjut. Berikut adalah gambaran usia para buruh gendong di Pasar Giwangan:

Tabel 1.1 Usia Buruh Gendong di Pasar Giwangan

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	>80	1 orang	0,74%
2.	70 – 79	4 orang	2,96%
3.	60 – 69	26 orang	19,26%
4.	50 – 59	68 orang	50,37%
5.	40 – 49	26 orang	19,26%
6.	30 – 39	10 orang	7,41 %
TOTAL		135 orang	100%

Sumber: Dokumen Yasanti Tahun 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang perempuan menjadi buruh gendong adalah ekonomi. Kebutuhan yang semakin meningkat, membuat perempuan ikut andil dalam mencari nafkah. Sebagian buruh gendong,

¹Wawancara dengan Ibu Umi Asih selaku Pendamping buruh gendong Pasar Giwangan pada hari Senin, 04 Februari 2019.

²*Ibid.*,

bekerja untuk membantu suami dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan sebagian lagi, menjadikan pekerjaan ini sebagai tumpuan hidupnya. Karena mereka merupakan pencari nafkah utama bagi keluarganya. Selain faktor ekonomi, faktor sosial-budaya juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi seseorang menjadi buruh gendong. Buruh gendong merupakan pekerjaan turun-temurun. Para perempuan menjadi buruh gendong biasanya untuk menggantikan posisi orang tuanya atau keluarganya, bisa juga karena ajakan dari teman atau tetangga.³

Pekerjaan kasar ini dilakukan oleh para perempuan sebagai bukti atas ketidakmampuan mereka dalam memasuki sektor formal. Ketidakmampuan tersebut berangkat dari peluang kerja formal yang ada masih terbatas dan kompetitif, sehingga penduduk yang tidak mampu berkompetisi di sektor formal cenderung masuk ke sektor informal. Tentunya, pekerjaan itupun hanya mempunyai harapan dan insentif yang lebih rendah.⁴ Hal tersebut terbukti dari pendapatan yang diperoleh buruh gendong hanya berkisar Rp.30.000 – Rp.50.000 per harinya.⁵ Diperkuat lagi dengan rendahnya sumber daya manusia mereka, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun keahliannya.

Buruh gendong di Pasar Giwangan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Buruh gendong yang tidak pernah sekolah mencapai

³Hasil wawancara dengan Ibu Suratmi, Ketua 1 Paguyuban Sayuk Rukun Pasar Giwangan pada hari Senin, 11 Februari 2019.

⁴Munir, *Gerakan Perlawanan Buruh: Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra reformasi*, (Jawa Timur: Omah Munir, 2014), hlm. 71.

⁵Hasil wawancara dengan Ibu Suratmi, Ketua 1 Paguyuban Sayuk Rukun Pasar Giwangan pada hari Senin, 11 Februari 2019.

angka 50% atau sekitar 55 orang; tidak tamat SD sebanyak 34 orang (34,56%); tamat SD sebanyak 18 orang (12,73%); dan tamat SMP sebanyak 3 orang (2,72%).⁶ Tamatan SMP menjadi tingkat pendidikan tertinggi dikalangan buruh gendong Pasar Giwangan, sehingga sebagian besar buruh gendong tidak bisa baca-tulis. Mereka bekerja menjadi buruh gendong karena tidak ada pilihan lain selain pekerjaan yang mengandalkan fisik. Penghasilannya pun lebih menjanjikan dibandingkan dengan buruh tani dimana mereka harus menunggu musim-musim tertentu.

Setiap jenis pekerjaan pasti memiliki resiko dan tantangan. Berbagai persoalan pun juga harus dihadapi oleh buruh gendong. Apalagi pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sarat akan resiko bagi para perempuan. Dari segi biologis atau fisik, para buruh gendong sering mengeluhkan sakit dibagian punggung, pinggang, lutut dan kaki, apalagi rata-rata usia mereka sudah tidak muda lagi.

Menurut penuturan Ibu Suratmi (buruh gendong), ia sendiri pernah jatuh saat menggendong, tertimpa keranjang kayu (*bagor*) yang berisi buah dan sayur-sayuran dengan berat puluhan kilo serta keseleo. Hal tersebut juga sering dialami oleh buruh gendong lainnya, bahkan ada yang mengalami kecelakaan kerja lebih parah dari dirinya, seperti patah tulang dan luka-luka karena jatuh yang pernah dialami oleh Ibu Rubiyah.⁷ Berbagai penyakit fisik, seperti penyakit tulang (penyakit tua) juga mengintai para buruh gendong.

⁶Wawancara dengan Ibu Umi Asih, Pendamping buruh gendong Pasar Giwangan pada hari Senin, 04 Februari 2019.

⁷Hasil wawancara dengan Ibu Suratmi, Ketua 1 Paguyuban Sayuk Rukun Pasar Giwangan pada hari Sabtu, 26 Januari 2019.

Sedangkan pekerjaan mereka hampir sepenuhnya mengandalkan fisik. Sementara itu, biaya pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja atau sakit harus ditanggung sendiri oleh buruh gendong. Hal tersebut dikarenakan para buruh gendong belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun mereka memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS kesehatan, mereka hanya dapat mengaksesnya di daerah asal (domisili) mereka.

Persoalan lain dari segi sosial-budaya di Indonesia yang masih memegang kuat konsep patriarki banyak merugikan kaum perempuan, salah satunya buruh gendong. Konsep tersebut mengerucutkan bahwa kewajiban utama perempuan adalah di ranah domestik (sektor rumah tangga). Sedangkan perempuan yang masuk ke ranah publik (bekerja) berarti ia memiliki dua tanggungan (kewajiban) yaitu di ranah domestik dan publik yang keduanya harus dijalankan oleh perempuan. Sehingga mereka harus memikul beban kerja yang ganda.⁸ Jadi selain bekerja, perempuan buruh gendong juga berkewajiban mengurus urusan rumah tangga, mulai dari kebersihan rumah, memasak, melayani suami dan anak-anaknya.

Sistem ekonomi industri yang kapitalistik yang mengutamakan pertumbuhan dan konsumsi juga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi di bidang ekonomi dapat dilihat dari kesenjangan upah yang diterima perempuan dibanding laki-laki.⁹ Perempuan yang bekerja dipandang sebagai pencari uang tambahan bagi keluarga, sedangkan laki-laki

⁸Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke-2, Mei 2011), hlm. 16.

⁹Dwi Edi Wibowo, *Peran Ganda Perempuan dan Kesenjangan Gender*, (Jurnal Muwazah, Vol. 3, No. 1, Juli 2011), hlm. 357.

merupakan pencari nafkah utama.¹⁰ Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembagian pekerjaan secara seksual di masyarakat yang menempatkan peran utama perempuan adalah di ranah domestik dan ranah publik (bekerja) merupakan peran dan kewajiban laki-laki.¹¹

Pandangan seperti dijelaskan di atas masih berakar kuat di dalam masyarakat, sehingga hal tersebut membuat upah yang diterima oleh perempuan buruh gendong lebih rendah dibandingkan dengan kuli panggul laki-laki. Tahun 2019, upah yang diterima buruh gendong perempuan berkisar 4000 rupiah sekali angkut dengan beban barang yang diangkut mencapai 50 kg ke atas. Bahkan untuk beban barang di bawah 50 kg, buruh gendong hanya mendapatkan upah sekitar 2000 – 3000 rupiah. Sedangkan kuli panggul laki-laki biasanya akan mendapat upah lebih banyak dengan beban barang yang sama.¹² Selain itu, buruh gendong juga harus berebut pekerjaan dengan kuli panggul dimana hal tersebut sering membuat mereka tersisihkan.

Buruh gendong juga rawan mendapatkan kekerasan. Bentuk kekerasan yang pernah dialami buruh gendong contohnya perlakuan semena-mena oleh pedagang atau juragan mereka, seperti dibentak atau omongan kasar dan terkadang dipandang sebelah mata oleh mereka. Selain itu berupa pelecehan seksual, yaitu menyentuh/memegang bagian tubuh tertentu baik disengaja

¹⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-4, Desember 1999), hlm. 74.

¹¹T.O. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. 1, Agustus 1995), hlm. 85.

¹²Pebriansyah Ariefana, *Rubiyah: Kisah Buruh Gendong Yogyakarta dan Ancaman Kekerasan Seksual*, <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/wawancara/2019/02/07/144457/rubiyah-kisah-buruh-gendong-yogyakarta-dan-ancaman-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 04 April 2019.

atau tidak dan hal tersebut tidak diinginkan oleh pihak yang dilecehkan. Sehingga menimbulkan ketidaksenangan, penghinaan, rasa tertekan bahkan serangan.¹³

Ibu Rubiyah dalam wawancara dengan Tempo.co menjelaskan bahwa dirinya pernah mendapatkan pelecehan seksual oleh pekerja laki-laki, pelecehan tersebut seperti disenggol bagian payudaranya. Dirinya mengaku mendapatkan bentuk-bentuk pelecehan semacam itu dari mulai menjadi buruh gendong, yaitu tahun 2004 sampai 2007.¹⁴

Persoalan lainnya juga datang dari kondisi tempat kerja. Ada beberapa permasalahan yang dialami buruh gendong perempuan di Pasar Giwangan, yaitu: (1) Jalan di pasar tidak rata dan sempit, parkir belum teratur sehingga menyulitkan dan membahayakan ketika *nggendong*. (2) Tidak ada ruang untuk pertemuan warga pasar terutama buruh gendong. (3) Upah rendah, dimana jarak tempuh (jauh-dekat) tidak diperhitungkan dalam pemberian upah. (4) fasilitas pasar kurang memadai, seperti buruh gendong harus membayar ketika ingin ke toilet; tempat istirahat masih menumpang di lapak juragan.¹⁵

Buruh gendong perempuan sebagai pekerja juga belum memiliki perlindungan hukum ataupun pengakuan dari pemerintah, sehingga mereka rawan dieksploitasi. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang

¹³Romany Sihite, *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan: suatu tinjauan berwawasan gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 71.

¹⁴Indri Maulidar, *Rubiah: Perempuan Kuat di Pasar Yogyakarta*, dapat dilihat https://investigasi.tempo.co/perempuan-berdaya/tokoh_06.html di akses pada tanggal 4 April 2019.

¹⁵Hasil wawancara dengan Ibu Umi Asih, Pendamping buruh gendong Pasar Giwangan pada hari Senin, 04 Februari 2019.

ketenagakerjaan pada dasarnya telah menjelaskan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, seperti mendapatkan upah yang layak, K3, Jaminan sosial dan kesehatan, perlindungan, dan lain-lain.¹⁶ Namun, undang-undang tersebut hanya menjamin pekerja formal saja. Hal ini dikarenakan buruh gendong merupakan pekerjaan informal yang mana mereka bekerja bukan kepada pemberi kerja, tetapi menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pihak lainnya karena hasil kerjanya tersebut.¹⁷ Hubungan kerja buruh gendong juga tidak berbadan hukum dan atas dasar kepercayaan atau kesepakatan saja, sehingga mereka tidak mendapatkan standar kelayakan hak atau sering dikenal dengan kontrak yang tersamarkan.

Peneliti melihat berbagai permasalahan buruh gendong di atas menggunakan kacamata feminisme-sosialist. Paradigma feminisme-sosialist menjelaskan bahwa ketidakadilan gender (*gender inequalities*) berasal dari keterkaitan antara kapitalisme dan patriarki. Opresi perempuan, dalam hal ini buruh gendong, bukanlah hasil dari tindakan individu, melainkan produk dari struktur politis (pengaruh kekuasaan, misal lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap buruh gendong); sosial (tatanan sosial masyarakat, misal posisi buruh gendong ditempatkan pada tatanan sosial yang rendah dalam masyarakat); dan ekomonis (dominasi sektor dalam perekonomian, misal dominasi pekerja laki-laki dan/atau pedagang) tempat individu hidup.¹⁸ Oleh

¹⁶Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Bab X mengenai Perlindungan, pengupahan, dan Kesejahteraan Pekerja.

¹⁷Bagus Prasetyo, *Menanti Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal*, www.gresnews.com/berita/opini/99065-menanti-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-sektor-informal/ di akses pada tanggal 1 Maret 2019.

¹⁸Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*,...hlm. 76.

karena itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan proses penyadaran, baik kepada buruh gendong, masyarakat, maupun pemerintah. Proses penyadaran tersebut dilakukan oleh Yasanti.

Yasanti atau Yayasan Annisa Swasti adalah salah satu LSM yang peduli terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pekerja perempuan, salah satunya buruh gendong perempuan di DIY. Bentuk penyadaran yang dilakukan Yasanti dilakukan melalui advokasi. Advokasi ini merupakan advokasi kebijakan perburuhan terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak buruh gendong sebagai perempuan pekerja, baik ditingkat keluarga; masyarakat di lingkungan tempat tinggal dan/atau tempat kerja; dan pemerintah.

Bertolak dari latar belakang di atas, Yasanti merupakan LSM yang menginisiasi gerakan advokasi terhadap buruh gendong perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya. Dalam mencapai tujuan tersebut, Yasanti melakukan berbagai macam strategi advokasi, mulai dari mengadakan pendidikan kritis, mengadakan dialog dan diskusi-diskusi, kampanye, mengembangkan usaha-usaha berbasis komunitas, dan berjejaring. Maka menjadi alasan peneliti memilih Yasanti sebagai subyek penelitian ini untuk mengkaji mengenai “Advokasi hak-hak dasar buruh gendong perempuan oleh Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) di Pasar Giwangan Yogyakarta” sebagai judul penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana advokasi hak-hak dasar buruh gendong perempuan oleh Yasanti di Pasar Giwangan?”

C. Tujuan penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi advokasi yang dilakukan oleh Yasanti mulai dari perencanaan sampai dengan aksinya dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan bagi buruh gendong di Pasar Giwangan.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah referensi bagi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam mata kuliah Advokasi Sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan sosial lainnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan kepada aktivis atau praktisi Yasanti dan para buruh gendong

perempuan dalam pelaksanaan praktik advokasi pemenuhan hak-hak pekerja/buruh.

E. Kajian Pustaka

Mengetahui posisi penelitian yang sedang dilakukan di tengah-tengah penelitian-penelitian terdahulu merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap paling sesuai dan relevan. Tujuannya adalah untuk mencari perbandingan terhadap fokus penelitian. Sehingga mencegah adanya kesamaan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Kajian pustaka berguna juga sebagai pedoman dalam melakukan penelitian lanjutan dan mencari kebaruan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Sehingga apabila permasalahan sosial tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya, maka penelitian ini digunakan sebagai bahan pelengkap atau memperkaya dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Isnia Latifah Sari, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul, “*Pengorganisasian Buruh Gendong Perempuan Pasar Beringharjo Yogyakarta Oleh Yayasan Annisa Swasti (Yasanti)*”.¹⁹ Fokus penelitian ini yaitu terkait dengan proses dan hasil dari pengorganisasian Buruh Gendong

¹⁹Isnia Latifah Sari, *Pengorganisasian Buruh Gendong Perempuan Pasar Beringharjo Yogyakarta oleh Yayasan Annisa Swasti (Yasanti)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Pasar Beringharjo yang dilakukan oleh Yasanti. Proses pengorganisasian dilakukan melalui delapan tahapan atau proses.

Pertama, Yasanti melakukan penelitian terhadap Buruh Gendong di Pasar Beringharjo pada tahun 1989 dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran mengenai subyek yang akan diteliti lebih lanjut. *Kedua*, Yasanti mulai membangun kontak person dengan cara mendatangi kos-kosan Ledok Ratmakan, karena awal mulanya yang menjadi sasaran Yasanti adalah para Buruh Gendong yang tinggal di kost Ledok Ratmakan. Yasanti membangun komunikasi dengan media pengajian. *Ketiga*, pengajian yang diadakan oleh Yasanti kemudian dijadikan wadah bagi Yasanti dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Buruh Gendong, seperti permasalahan mengenai upah minim.

Keempat, Yasanti mulai menambah kegiatan-kegiatan untuk Buruh Gendong selain pengajian. Kegiatan tersebut yaitu arisan yang kemudian berkembang menjadi kegiatan simpan pinjam. *Kelima*, kelompok dampingan yang awalnya hanya satu, kemudian berkembang menjadi empat kelompok buruh gendong dampingan Yasanti. *Keenam*, terbentuknya empat kelompok Buruh Gendong menjadi kurang efektif, sehingga Yasanti dan Buruh Gendong sepakat untuk menggabungkan keempat kelompok tersebut menjadi paguyuban yang diberinama “Paguyuban Sayuk Rukun” pada tahun 2001. *Ketujuh*, setelah terbentuk paguyuban, Yasanti kemudian menerapkan program kerja. Program kerja ini merupakan hasil dari pengorganisasian Yasanti terhadap Buruh Gendong di Pasar Beringharjo, yaitu: kegiatan

simpan pinjam, usaha alternatif, tabungan, cek kesehatan, kegiatan diskusi, sekolah kepemimpinan, pengajian, hadrohan, dan penyadaran akan hak berpolitik. *Kedelapan*, Yasanti melakukan penguatan Jaringan, yaitu bekerjasama dengan PKBI dan IWE.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dian Buana Putri, Program Studi Antropologi Budaya UGM, tahun 2015 yang berjudul “*Penguatan Kapasitas Buruh Gendong Melalui Sekolah Kepemimpinan di Yayasan Annisa Swasti*”.²⁰ Fokus penelitian ini yaitu terkait dengan pelaksanaan sekolah buruh gendong. Sekolah buruh gendong diselenggarakan oleh Yasanti dengan bekerjasama dengan IWE (*Institute for Women’s Empowerment*). Sekolah ini diadakan pada tahun 2014-2015, dengan diikuti oleh 25 orang buruh gendong yang tersebar di empat pasar, yaitu Pasar Beringharjo, Giwangan, Kranggan, dan Gamping. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat kapasitas buruh gendong baik dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan lingkungan tempat tinggalnya.

Proses pembelajaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu *in class* (penyampaian materi) dan *out class* (praktik lapangan). Hasil dari sekolah buruh gendong dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori Longwe, yang di dalamnya meliputi aspek akses, kesadaran kritis, partisipasi, kontrol dan kesejahteraan. Akses yang didapat dari para buruh gendong sedikit banyaknya lebih terbuka setelah adanya program ini. Nyata dirasakan

²⁰Dian Buana Putri, *Penguatan Kapasitas Buruh Gendong Melalui Sekolah Kepemimpinan di Yayasan Annisa Swasti (Yasanti)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya, UGM, 2015).

perubahannya oleh para peserta adalah lebih dihargai dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Buruh gendong peserta sekolah menjadi lebih berani menyuarakan pendapatnya kepada publik. Selain itu, adanya kesadaran dalam membagi waktu secara efisien; lebih dapat peka terhadap permasalahan di antara sesama teman; dan adanya kesadaran dalam berorganisasi. Buruh gendong juga lebih dapat mengontrol terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dalam mengambil keputusan. Dengan adanya program sekolah ini, tentunya secara langsung ataupun tidak telah meningkatkan kesejahteraan buruh gendong. Kesejahteraan ini terlihat dari adanya perubahan baik kecil atau pun besar yang terjadi pada diri buruh gendong maupun lingkungannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitrayani Dian Rosita Dewi, Program Studi Antropologi Budaya tahun 2017 yang berjudul “*Membangun Kesetaraan Relasi Gender: Studi Kasus Empat Perempuan Buruh Gendong dalam Rumah Tangga di Yogyakarta*”.²¹ Penelitian ini membahas mengenai peningkatan kesetaraan gender dalam rumah tangga buruh gendong melalui relasi antara suami dan istri. Penelitian ini menganalisis mengenai apakah ada peningkatan dan/atau perubahan kesetaraan gender dalam relasi suami dan istri terhadap empat buruh gendong setelah mengikuti sekolah buruh gendong. Keempat buruh gendong dan suaminya yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah (1) Bu Rubiyah dan Pak Adi; (2) Bu Sumari dan Pak Tukiran; (3) Bu Suratmi dan Pak Robi; dan (4) Bu Sarwiatun dan Pak Parlan.

²¹Fitrayani Dian Rositadewi, *Membangun Kesetaraan Gender: Studi Kasus Empat Perempuan Buruh Gendong Pasar Giwangan dalam Rumah Tangga di Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya, UGM, 2017).

Dari keempat pasangan di atas, kesemuanya mengalami perubahan dalam relasi gender di rumah tangga masing-masing. Perubahan-perubahan tersebut secara garis besar terlihat pada pengambilan keputusan dalam rumah tangga, misalnya suami memberikan izin istri untuk bekerja dan berorganisasi; suami dan istri melakukan diskusi dalam pengambilan keputusan. Pekerjaan domestik dalam rumah tangga juga menjadi sama-sama dipikul oleh suami maupun istri. Sebagai pasangan, suami mulai mau ikut membantu istri dalam menyelesaikan urusan domestik, seperti menyapu, mencuci, bahkan masak. Keempat buruh gendong peserta sekolah juga terus menerus mengenalkan kepada suami mereka mengenai gender, yaitu peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga khususnya. Dari situ, para suami sedikit demi sedikit menjadi lebih menghormati dan tidak ada yang merasa memiliki kedudukan paling tinggi di dalam keluarga.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Pradita Debby Mutiara, Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik UGM tahun 2015, yang berjudul *“Responsivitas Gender dalam Proses Pemberdayaan oleh Yayasan Annisa Swasti (Studi pada Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong Pasar Beringharjo).”*²² Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program sekolah buruh gendong. Bagaimana responsivitas gender pada kegiatan ini dan apakah manfaatnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Longwe.

²²Pradita Debby Mutiara, *Responsivitas Gender dalam Proses Pemberdayaan oleh Yayasan Annisa Swasti: Studi pada Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong Pasar Beringharjo*, Tesis (Yogyakarta: Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, 2015).

Sekolah kepemimpinan buruh gendong dari Pasar Beringharjo diikuti oleh sepuluh orang peserta, dari 25 peserta keseluruhan. Hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwa sekolah buruh gendong ini telah responsif gender. Responsivitas gender dilihat menggunakan teori Longwe, yang di dalamnya mencakup kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol.

Level kesejahteraan ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan buruh gendong, misalnya upah yang sebelum adanya kegiatan hanya berkisar Rp. 2000,00 – Rp. 2.500,00 menjadi Rp. 3000,00 – 4.500,00. Level akses ditandai dengan terbukanya akses buruh gendong pada sumber daya produktif, misalnya pengadaan dari kegiatan sekolah buruh gendong telah membuka akses pendidikan bagi mereka. Level kesadaran kritis ditandai dengan terbentuknya kesadaran kritis buruh gendong terhadap peran gender, misalnya adanya peningkatan kepercayaan diri pada buruh gendong untuk menyatakan pendapat di publik. Level partisipasi ditandai dengan keaktifan buruh gendong dalam komunitas, yaitu peguyuban Sayuk Rukun, misalnya buruh gendong ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di dalam paguyuban seperti simpan pinjam. Level kontrol ditandai dengan kemandirian buruh gendong, misalnya para peserta menjadi pemimpin (*leader*) dalam komunitasnya.

Berdasarkan temuan peneliti terhadap tiga skripsi dan satu tesis yang telah dipaparkan di atas, kebaruan dari penelitian yang berjudul, “*Advokasi Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Buruh Gendong di Pasar Giwangan Yogyakarta*” terletak pada tujuan penelitian,

yaitu strategi advokasi yang digunakan dalam melakukan praktik advokasi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, teori yang digunakan juga jelas berbeda, peneliti menganalisis temuan-temuan dilapangan menggunakan teori advokasi kebijakan.

Waktu penelitian juga berbeda dan subyek yang peneliti gunakan tidak hanya pengurus Yasanti, tetapi juga buruh gendong yang bekerja di Pasar Giwangan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa telah banyak penelitian serupa yang membahas mengenai buruh gendong dan peran Yasanti, tetapi peneliti belum pernah menemukan penelitian yang mengkaji secara khusus mengenai strategi advokasi yang dilakukan Yasanti dan buruh gendong Pasar Giwangan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Advokasi

a. Pengertian Advokasi

Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut Bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai ‘kegiatan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan’. Mengadopsi kata ‘advokasi’ dari bahasa Inggris, maka *to advocate* tidak hanya berarti membela (*to defend*), tetapi juga bisa berarti ‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (*to promote*) yang, dengan kata lain juga berarti berusaha menciptakan (*to create*) yang baru, yang belum ada. Dengan

kata lain juga berarti melakukan ‘perubahan’ (*to change*) secara terorganisir dan sistematis.²³

Advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala tipe institusi. Organisasi *the Centre for Development and Population Activities/CEDPA* mengajukan definisi bahwa advokasi adalah bekerja dengan orang dan organisasi lain untuk membuat perubahan atau perbedaan.²⁴ Advokasi dilakukan dengan cara mengajukan, mempertahankan atau merekomendasikan suatu gagasan di hadapan orang lain. Advokasi ini merupakan kegiatan berbicara, menarik perhatian masyarakat tentang suatu masalah, dan mengarahkan pengambil keputusan mencari solusi. Advokasi adalah memasukkan suatu problem ke dalam agenda, mencari solusi mengenai problem tersebut dan membangun dukungan untuk bertindak menangani problem maupun solusinya.²⁵

Menurut Rachmad Gustomy, kegiatan utama praktik advokasi terbagi menjadi tiga, yaitu: pendidikan, pengorganisasian dan advokasi itu sendiri.²⁶ Valerie Miller dan Jane Covey menambahkan dalam bukunya yang berjudul, “*Advocacy Sourcebook: Framework*

²³Mansour Fakih, dkk, *Mengubah Kebijakan Publik*, Cet. Ke-5 (Yogyakarta: Insist Press, Juli 2007), hlm. 7.

²⁴Hadi Pratomo, *Advokasi: Konsep, Teknik, dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia* Ed. 1 (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm. 33.

²⁵Ritu R. Sharma, *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*, Ed. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Mei 2004), hlm. 7-8.

²⁶Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis Jejaring* (Yogyakarta, PolGov, 2010), hlm. 78.

for Planning, Action, and Reflection”²⁷ bahwa advokasi itu adalah tindakan dalam membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggungjawab dan menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja. Pada saat tertentu, advokasi itu dapat didefinisikan lebih sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dalam situasi lain, advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang lebih efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat.

Advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (*public interest*).²⁸ Menurut UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa advokasi merupakan bentuk daripada perlindungan sosial. Definisi tentang advokasi dijelaskan sebagai berikut:

“Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar

²⁷Valerie Miller dan Jane Covey, *Buku Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Bertindak, dan Refleksi*, Ed. 1, Penerjemah: Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 12.

²⁸Kadin Indonesia, *Membangun Kadin yang Efektif: Pedoman Advokasi Kebijakan*, dilihat pada laman www.kadin-indonesia.or.id pada tanggal 19 Februari 2019.

haknya.²⁹ Advokasi sosial sebagaimana yang dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.³⁰”

Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik.³¹ Advokasi merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah (miskin, terbelakang, dan tertindas) atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidakadilan. Nilai yang dibangun dalam advokasi bukanlah nilai profit dan pelanggaran kekuasaan politik elit, akan tetapi advokasi yang ditujukan untuk membela kelompok-kelompok marjinal. Ia ditujukan untuk keadilan sosial yang meletakkan korban kebijakan sebagai subyek utama.³²

Peneliti simpulkan dari berbagai pengertian tentang advokasi di atas, bahwa pada intinya advokasi adalah sebuah tindakan aksi sosial yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dalam memperbaiki, membela, dan/atau mengubah suatu keadaan atau kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,

²⁹Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 16 ayat (1).

³⁰Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 16 ayat (2).

³¹Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi Irigasi* (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006), hlm. 16.

³²Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis Jejaring* (Yogyakarta, PolGov, 2010), hlm. 12.

baik secara individu maupun kelompok dari kalangan bawah, menengah, maupun atas.

Ulil Absor mengutip Freddolino dalam penelitian yang berjudul *A Differential Model Of Advocacy In Social Work Practice, In Families And Society* menjelaskan bahwa tujuan advokasi adalah memperjuangkan hak individu, kelompok atau masyarakat, melindungi dari segala macam bentuk penindasan (eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, marginalisasi), menyelesaikan hambatan birokratis dalam pemberian layanan sosial, dan memfasilitasi tersedianya akses terhadap sumberdaya, layanan dan peluang-peluang lain yang ada.³³

b. Membentuk Lingkar Inti

Membentuk lingkaran inti adalah langkah pertama yang harus dilakukan dari proses advokasi. Lingkar inti merupakan kumpulan orang dan/atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi.³⁴ Lingkar inti merupakan tim kerja yang memegang kendali atau komando utama yang siap setiap saat di 'markas besar pusat' selama proses advokasi berlangsung.

³³M. Ulil Absor, *Advokasi Penanganan Korban Trafficking Perempuan dan Anak: Lesson Learnt dalam Advokasi Kebijakan di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur* (Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 2, Desember 2012), diakses di ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/welfare 20 Februari 2019. Atau dapat dilihat di Freddolino et.al, *A Differential Model Of Advocacy In Social Work Practice, In Families And Society*, (in The Journal Of Contemporary Social Services: Jan-March: 85, 2004), hlm. 120.

³⁴Mansour Fakih, dkk, *Mengubah Kebijakan Publik...*hlm.61.

Secara keseluruhan, pola kerja advokasi terbagi menjadi tiga, yaitu: kerja basis; kerja pendukung; kerja garis depan.³⁵ Lingkaran inti utama adalah para pihak yang menjalankan fungsi-fungsi kerja basis. Kerja basis merupakan ‘dapur’ gerakan advokasi yang bertugas dalam membangun basis massa, membentuk lingkaran-inti dan mobilisasi aksi. Sedangkan yang berada di bagian kerja pendukung adalah para pihak yang memiliki tugas dalam menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data dan akses. Selain itu, ada pola kerja yang memainkan fungsi-fungsi kerja di garis depan (*front linier*). Kerja garis depan ini adalah para pihak yang bertugas melaksanakan fungsi sebagai juru-bicara, perunding, pelobby, terlibat dalam proses legislasi dan yurisdiksi serta menggalang sekutu.

Walaupun anggota utama lingkaran inti adalah para pihak di kerja basis, namun tidak menutup kemungkinan mereka yang berada di kerja pendukung dan kerja garis depan tidak bisa masuk ke lingkaran inti. Oleh karena itu, ketiga pola kerja advokasi tersebut memang saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Lingkaran inti disepakati berdasarkan hasil analisa mengenai siapa yang menjadi korban; siapa yang membela; siapa yang mendukung; dan siapa yang dihadapi.

c. Memilih Isu Strategis

Setelah terbentuknya lingkaran inti, hal berikutnya yang harus dikerjakan adalah memilih isu yang strategis. Sebuah isu didapatkan

³⁵Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis Jejaring...* hlm. 52.

dari hasil pengumpulan data dan informasi yang kemudian dianalisis issu mana yang benar-benar strategis untuk diadvokasikan.

Ada syarat-syarat sebuah issu dikatakan strategis. *Pertama*, keaktualitasan yaitu issu tersebut memang sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat. *Kedua*, memang penting dan mendesak sehingga harus segera ditangani dan/atau ditemukan solusinya. *Ketiga*, memang penad dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar masyarakat atau dalam hal ini korban ketidakadilan. *Keempat*, memang akan berdampak positif pada perubahan kebijakan-kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. *Kelima*, memang sesuai dengan visi dan agenda perubahan yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dirancangkan oleh lingkaran inti.³⁶

Peneliti simpulkan bahwa issu strategis merupakan akar masalah dari masalah-masalah yang ditemukan berdasarkan data dan informasi di lapangan. Issu strategis apabila dapat ditangani maka akan dapat menyelesaikan masalah-masalah lainnya yang menjadi cabang dari akar masalah. Setelah menentukan issu strategis ini, maka para pelaku advokasi dapat menentukan sasaran advokasinya. Sasaran advokasi kebijakan secara keseluruhan ada tiga yang di sebut dengan 'sistem hukum'. Ketiga aspek sistem hukum ini adalah isi hukum, tata laksana hukum dan budaya hukum.

³⁶Mansour Fakih, dkk, *Mengubah Kebijakan Publik...*hlm.71.

Isi hukum (*content of law*), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. Tata laksana hukum (*structure of law*), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana isi hukum yang berlaku yang mencakup lembaga-lembaga hukum dan para aparat pelaksananya. Budaya hukum (*culture of law*) yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, bentuk-bentuk tanggapan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum (isi dan tata laksana hukum).³⁷ Kegiatan advokasi idealnya harus mencakup sasaran perubahan ketiganya, baik perubahan dalam isi, tata laksana, maupun budaya hukum.

d. Strategi Advokasi

Strategi advokasi adalah taktik yang dilakukan dalam kegiatan advokasi sehingga tercapai tujuan dari dilakukannya praktik advokasi. Advokasi dalam rangka mengubah atau memperbaiki kebijakan publik sesuai kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan atau perbaikan tersebut. Kebijakan tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu sistem hukum yang di dalamnya memuat aspek isi hukum, tata laksana hukum dan budaya hukum.

³⁷Mansour Fakih, dkk, *Mengubah Kebijakan Publik*, Cet. Ke-5 (Yogyakarta: Insist Press, Juli 2007), hlm. 45.

Upaya mencapai tujuan utama advokasi, yaitu menciptakan kebijakan yang adil, maka diperlukan strategi untuk memenangkannya. *Pertama*, membangun basis gerakan yaitu kaitannya dengan sosialisasi dan mobilisasi massa. *Kedua*, membangun jaringan yaitu kaitannya dengan penggalangan sekutu dan satuan pendukung. Sekutu adalah orang ataupun kelompok yang mendukung dan ikut terlibat dalam aksi advokasi. Sedangkan satuan pendukung adalah orang atau kelompok yang tidak terlibat dalam aksi tetapi hanya memberikan dukungan saja (*supporting unit*).

Ketiga, membentuk opini publik. Para pihak yang terlibat dalam proses advokasi berperan menjadi *agenda setter* yang berusaha untuk mempengaruhi opini publik agar sejalan dengan yang diinginkan sehingga proses advokasi akan mendapat dukungan dari masyarakat luas. Opini dapat dibangun melalui kegiatan-kegiatan seperti kampanye, demonstrasi, aksi mogok, pembangkangan dan perlawanan diam-diam.³⁸

Keempat, pengaruh pembuat kebijakan dalam hal ini tata laksana hukum. Proses mempengaruhinya dapat melalui lobbi yaitu sebuah kegiatan advokasi dalam mempengaruhi para pengambil

³⁸Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis Jejaring...*, hlm. 79

keputusan agar memberikan dukungan terhadap isu-isu yang diadvokasikan.³⁹

2. Tinjauan tentang Hak-Hak Dasar Pekerja Informal

a. Definisi Buruh/Pekerja

Pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain dengan mendapatkan upah. Buruh adalah tenaga kerja sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dilanjut pada ayat 3 dijelaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴⁰

Pada dunia ketenagakerjaan, ada pembagian status ketenagakerjaan, yakni tenaga kerja formal dan informal. Istilah sektor formal seringkali dianggap untuk merujuk pada hubungan antara pekerja dengan pemilik usaha yang memberikan upah (*waged employment*).⁴¹ Sedangkan sektor informal dalam UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat (32) adalah “*tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan*

³⁹Hadi Pratomo, *Advokasi: Konsep, Teknik, dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia...*, hlm. 90.

⁴⁰Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 dan 3.

⁴¹Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 143.

menerima upah dan/atau imbalan”. Dilanjut pada Pasal 1 Ayat (33) menegaskan bahwa *“hubungan kerja sektor informal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan/atau imbalan atau bagi hasil”*.⁴²

Menurut ILO, status pekerjaan informal meliputi: (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak di bayar, (3) pekerja bebas di pertanian, (4) pekerja bebas di non-pertanian, dan (5) pekerja keluarga/tidak dibayar.⁴³

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa buruh gendong adalah salah satu jenis usaha di sektor informal, dengan status ketenagakerjaan sebagai pekerja bebas di non-pertanian. Buruh gendong ini adalah tenaga kerja yang menjual jasa mereka kepada orang lain. Hubungan kerjanya tidak terikat dalam bentuk kontrak tertulis, melainkan hanya sebatas kesepakatan dan kepercayaan saja.

b. Hak-Hak Dasar Buruh Gendong

Seorang pekerja tentunya memiliki hak-hak dasar yang semestinya mereka peroleh baik dari perusahaan/pengusaha dan negara. Hak-hak dasar pekerja secara umum telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴²Undang-Undang No.25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (32 dan 33).

⁴³ILO, *Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi* (Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2010), hlm. 14.

Tepatnya pada BAB X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Hak-hak dasar pekerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁴⁴: *Pertama*, Hak yang bersifat ekonomis, antara lain hak atas upah, Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan hari tua, fasilitas perumahan, dan lain-lain.

Kedua, Hak yang bersifat politik, antara lain hak berserikat, hak menjadi atau tidak menjadi anggota serikat buruh, hak mogok kerja, hak tidak diskriminatif, dan lain-lain. *Ketiga*, Hak yang bersifat medis, antara lain hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak melahirkan, hak istirahat, hak menyusui anak, hak atas jaminan pemeliharaan kerja, larangan mempekerjakan anak, dan lain-lain. *Keempat*, Hak yang bersifat sosial, antara lain hak cuti, hak kawin, libur resmi, pembatasan pekerjaan anak dan perempuan pada malam hari.

Berbeda dengan pekerja formal yang lebih terjamin dan mudah dalam mendapatkan hak-hak dasarnya, pekerja informal dalam hal ini banyak yang tidak memperoleh hak-haknya dikarenakan adanya ketidakjelasan status mereka. Pada dasarnya, hak-hak dasar pekerja informal terutama perempuan telah dijelaskan dalam UUD 1945. Sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 mengandung muatan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan, termasuk pekerja

⁴⁴A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: YLBHI, 2006), hlm. 183.

perempuan sektor informal. Pasal 28D (1), berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”*.

Lebih lanjut mengenai hak konstitusional khusus terkait dengan hubungan kerja, antara lain: Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 Ayat (2)). Hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2)). Hak untuk tidak diperbudak (Pasal 28I ayat (1)). Hak kebebasan beribadat (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2)). Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3)). Hak jaminan sosial (Pasal 28H ayat (3)). Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, meliputi: hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H (1)). Hak atas informasi (Pasal 28F).

Selain hak-hak dasar yang telah dijelaskan di atas berdasarkan pada UUD 1945, menurut ILO pekerja informal juga berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan bagi pekerja di sektor informal secara esensial oleh ILO dikategorikan menjadi dua

kelompok, yaitu:⁴⁵ *Pertama*, perlindungan yang bertujuan untuk mempertahankan kapasitas pendapatan pekerja selama bekerja.

Perlindungan ini mencakup pelayanan kesehatan. Kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan juga merupakan hak bagi pekerja informal untuk dapat menjaga kesehatannya. Pelayanan kesehatan ini dapat disediakan oleh pemerintah ataupun melalui mekanisme sukarela, termasuk apa yang disebut sebagai skema asuransi mikro untuk pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, perlindungan sosial selama masa tidak mampu untuk bekerja (*in-capacity*). Tidak mampu bekerja disini dapat dikarenakan oleh sakit atau cacat karena kecelakaan kerja/kejadian mendadak lainnya. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui jamkesmas yang dananya dapat ditanggung bersama oleh pemilik usaha dan atau pemerintah; atau melalui pelayanan kesehatan serta sistem rehabilitasi bagi pekerja.

Selanjutnya, perlindungan pada masa kehamilan bagi pekerja perempuan. Pembayarannya ditanggung oleh pekerja perempuan dan laki-laki, serta didukung pula oleh pemilik usaha dan pemerintah. Kemudian, asuransi masa menganggur atau tidak bekerja serta skema kepegawaian tambahan lainnya, seperti yang selama ini diterima oleh pegawai publik. Dana skema dapat ditanggung oleh

⁴⁵Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 164.

pemerintah bersama dengan kontribusi dari pemilik usaha, serta hanya diberikan pada periode terbatas.

Kedua, perlindungan yang dapat memberikan jaminan pendapatan bagi pekerja dan keluarganya setelah masa kerjanya berakhir, agar mampu meminimalisir resiko pekerja tersebut terpuruk ke posisi di bawah garis kemiskinan. Perlindungan ini di antaranya yaitu: Tunjangan hari tua dan pensiun, termasuk perlindungan dari pemerintah yang memberikan pendapatan minimum atau tunjangan pensiun kepada kelompok usia lanjut; Jaminan sosial atau asuransi sosial; Tabungan masa tua, seperti dana kesejahteraan; Skema sukarela tambahan di masa pensiun; dan Bantuan sosial dari pemerintah.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau tata cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.⁴⁶ Metode penelitian secara umum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap sehingga diperoleh suatu pemahaman pengertian topik, gejala atau isu.⁴⁷ Adapun tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai advokasi Yasanti dalam pemenuhan hak-hak dasar buruh gendong perempuan di Pasar Giwangan menggunakan jenis

⁴⁶Hussaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 41.

⁴⁷Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 2.

penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, mengkategorikan, meringkas mengenai strategi pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh Yasanti dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan bagi buruh gendong, khususnya yang berada di Pasar Giwangan.⁴⁸

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif disajikan dalam naratif. Hasil penelitian kualitatif deskriptif berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan atau menyediakan bukti presentasi. Data-data tersebut melingkupi transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba menganalisis data dengan segala kekayaannya sedapat dan sedekat mungkin dengan bentuk rekaman dan transkripnya.⁴⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) yang beralamat di Jalan Puntodewo No. 1 RT.11 DK VII Jomogatan Ngestiharjo Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 55182 Indonesia.

⁴⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, April 2007), hlm. 68.

⁴⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2012), hlm. 3.

Penelitian ini juga dilakukan di Pasar Induk Buah dan Sayur Giwangan beralamat di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163 Indonesia.

3. Subyek penelitian dan obyek penelitian

Subyek dalam konsep penelitian merujuk kepada responden, informan yang hendak diminati informasi atau digali datanya, sedangkan obyek merujuk pada masalah atau tema yang sedang diteliti. Subyek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subyek penelitian kualitatif disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.⁵⁰

Penentuan informan sebagai subyek penelitian ini menggunakan teknik bola salju atau *snowballing sampling*. Adapun alasan memilih teknik tersebut adalah dikarenakan peneliti tidak tahu siapa yang memahami informasi obyek penelitian dan sulitnya dalam memperoleh informan. Sehingga dalam langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah menemukan *gatekeeper*, yaitu siapa pun orang yang pertama dapat menerima peneliti di lokasi obyek penelitian yang dapat memberi petunjuk tentang siapa yang dapat diwawancarai atau diobservasi dalam rangka memperoleh informasi tentang obyek penelitian.⁵¹

⁵⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, Edisi Kedua, 2009), hlm. 91.

⁵¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya...*hlm. 77.

Gatekeeper bisa pula sekaligus menjadi orang pertama yang diwawancarai, namun terkadang *gatekeeper* menunjuk orang lain yang lebih paham tentang obyek penelitian. Setelah wawancara pertama berakhir, peneliti meminta informan menunjuk orang lain berikutnya yang dapat diwawancarai untuk melengkapi informasi yang sudah diperolehnya. Terus-menerus setelah habis wawancara peneliti meminta informan menunjuk informan lain yang dapat diwawancarai pada waktu lain sampai data yang diperoleh lengkap.⁵² *Gatekeeper* dalam penelitian ini adalah Ibu Suratmi selaku buruh gendong sekaligus pengurus atau *leader* Paguyuban Sayuk Rukun di Pasar giwangan. Beliau merupakan orang pertama yang peneliti wawancarai dan dapat menghubungkan peneliti kepada pihak Yasanti maupun buruh gendong di Pasar Giwangan.

Obyek dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi sasaran sesuai dengan judul atau topik penelitian yang secara konkrit tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁵³ Adapun obyek penelitian ini adalah advokasi pemenuhan hak-hak dasar terhadap buruh gendong perempuan di Pasar Giwangan Yogyakarta.

⁵²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya...* hlm. 77.

⁵³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabet, 2008), hlm. 91.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara langsung kepada informan yaitu pihak Yasanti dan buruh gendong perempuan di Pasar Giwangan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan draft pertanyaan terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan antara lain seperti gambaran umum Yasanti dan Buruh Gendong di Pasar Giwangan mulai dari profil, visi-misi, struktur organisasi, program kerja, dan lainnya untuk diolah dan dinarasikan dibagian BAB II penelitian ini. Selain itu wawancara dilakukan juga dalam proses pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan atau strategi advokasi Yasanti dan buruh gendong Pasar Giwangan dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan bagi buruh gendong.

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipatoris, yaitu peneliti berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian. Kegiatan observasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kegiatan dan strategi dalam advokasi yang dilakukan Yasanti dalam pemenuhan hak-hak dasar buruh gendong.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terkait bagaimana sistem kerja para buruh gendong di Pasar Giwangan dan apa saja kegiatan yang dilakukan Yasanti dan buruh gendong terkait advokasinya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti antara lain terkait dengan data profil Yasanti, data dan profil buruh gendong di Pasar Giwangan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan tema penelitian. Dokumen tersebut berupa hasil penelitian, buku, catatan, foto, dan lain-lain.

5. Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode-metode di atas kemudian dianalisis. Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Emzir yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, ada tiga tahap dalam menganalisis data kualitatif, yaitu⁵⁴:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Penelitian ini akan

⁵⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...hlm. 129-133.

melakukan reduksi data dengan cara di atas kemudian dapat mengkategorikan data ke dalam tema penelitian yang telah ditentukan dengan aspek-aspek pada praktik advokasi sesuai dengan pedoman teori.

b. Model Data (*Data Display*)

Bentuk data dalam model data kualitatif ini akan disajikan dalam teks naratif. Maksudnya penyajian data dilakukan dengan cara menguraikan data yang ditemukan di lapangan mengenai advokasi pemenuhan hak-hak dasar buruh gendong untuk memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Data yang telah tersusun kemudian dilakukan penarikan kesimpulan mengenai gambaran kegiatan advokasi. Maka, penarikan kesimpulan ini merupakan uraian secara sistematis, jelas dan akurat.

6. Uji Keabsahan data

Penelitian ini melakukan pengujian keabsahan hasil penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Pengecekan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁵ Pengecekan ini di antaranya yaitu:

⁵⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya...* hlm. 257.

- a. Apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika wawancara dengan informan.
- b. Apakah sumber data ketika diwawancara dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Sumber data di sini di dapat dari informan, pengamatan di lapangan, maupun dokumen.

Peneliti melakukan pengecekan terhadap hal-hal di bawah ini:

- a. Mengecek relevansi antara hasil wawancara dengan informan terkait dengan kegiatan pendampingan dan program Yasanti dengan dokumen atau arsip Yasanti. Contoh, mengecek hasil wawancara terkait pelaksanaan sekolah kepemimpinan dengan dokumen dan notulensi dari Yasanti tahun 2014.
- b. Mengecek relevansi hasil wawancara dengan observasi peneliti terkait aksi advokasi pada saat di acara peringatan Hari HAM dan HAP tanggal 13 Desember 2019 dan observasi peneliti di Pasar Giwangan selama proses penelitian berlangsung.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan penelitian serta penulisan penelitian ini, maka peneliti memisahkan beberapa rangkaian tulisan yang dimuat dalam empat bab serta halaman daftar pustaka dan dokumen-dokumen lampiran pendukung penelitian yang masing-masing halaman memiliki isi serta pembahasan yang berbeda-beda seperti berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan yang juga merupakan bab pertama dalam tahap penelitian yang menjadi landasan serta acuan dalam melakukan

tahapan penelitian. Isi dari BAB I meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan yang terakhir mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II berisi tentang pembahasan terkait dengan pertanyaan umum yang memiliki isi seputar gambaran umum lokasi atau tempat penelitian. Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum Yasanti sebagai tempat penelitian yang meliputi sejarah berdirinya Yasanti, visi dan misi Yasanti; struktur organisasi Yasanti; program kerja Yasanti; dan lain-lain yang terkait dengan Yasanti. Selain itu juga menjelaskan mengenai profil buruh gendong di Pasar Giwangan.

BAB III akan menjelaskan mengenai isi atau hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian ini seputar dengan pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu terkait strategi atau pelaksanaan advokasi dalam pemenuhan hak-hak dasar buruh gendong di Pasar Giwangan Yogyakarta oleh Yasanti. Tentunya temuan selama proses penelitian di lapangan dianalisis berdasarkan teori yang peneliti jabarkan dalam point “kerangka teori” pada BAB I.

BAB IV merupakan bagian akhir dari penelitian dan sekaligus penutup dari kajian penelitian yang dilakukan di Yayasan Annisa Swasti (Yasanti). Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, disertakan juga saran serta rekomendasi kepada peneliti selanjutnya. Sekaligus sebagai bahan masukan bagi peneliti dan Yasanti serta pihak-pihak terkait seperti buruh gendong, pemerintah dan masyarakat untuk

dapat lebih baik lagi dalam melakukan penelitian ataupun mengadakan kegiatan/program. Bagian penutup ini juga berisi bahan lampiran pendukung penelitian seperti daftar pustaka, daftar riwayat hidup, foto dokumentasi, serta lampiran dokumen lainnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait advokasi hak-hak dasar buruh gendong oleh Yasanti di Pasar Giwangan dapat disimpulkan bahwa Yasanti sebagai lembaga masyarakat melakukan advokasi secara maksimal dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak pekerja buruh gendong perempuan, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada buruh gendong di Pasar Giwangan.

Advokasi hak-hak dasar buruh gendong dilakukan melalui tiga langkah, yaitu pembentukan lingkaran inti, penentuan isu strategis dan strategi advokasi. Lingkaran inti dibentuk melalui proses panjang, mulai dari penelitian data dan informasi mengenai buruh gendong, pendampingan, pembentukan paguyuban sampai akhirnya ditentukan anggota lingkaran inti. Anggota lingkaran inti terdiri dari *leader-leader* buruh gendong yang mengikuti ‘Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong’ selama dua tahun, selain itu juga Yasanti sebagai penggagas dan pendamping buruh gendong.

Anggota lingkaran inti memetakan persoalan-persoalan buruh gendong dan ditentukan isu mana yang paling strategis atau yang dapat merangkum semua persoalan-persoalan tersebut. Anggota lingkaran inti menyepakati isu strategis yang diangkat dalam advokasi adalah pengakuan dan perlindungan

bagi buruh gendong DIY. Sasaran advokasinya adalah pemerintah daerah melalui DPRD Komisi D; Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota), SKPD seperti Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan dan lapisan masyarakat.

Strategi Advokasi dilakukan dengan membangun basis gerakan buruh gendong dan membangun jaringan seluas-luasnya agar gerakan advokasi menjadi lebih kuat. Selain itu juga dilakukan pembentukan opini kepada publik baik melalui peringatan hari besar maupun melalui media; dan juga melakukan lobi-lobi kepada pemerintah. Tujuan utama dari advokasi ini adalah terbitnya suatu produk hukum yang mengakui, melindungi dan mengatur hak dan kewajiban buruh gendong. Akan tetapi, hal tersebut belum tercapai. Walaupun demikian, perjalanan Yasanti telah meningkatkan kondisi buruh gendong menjadi lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan advokasi Yasanti dalam pemenuhan hak-hak dasar buruh gendong di Pasar Giwangan terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Berikut peneliti jabarkan dalam poin-poin di bawah ini:

1. Bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu lebih memperhatikan para perempuan yang bekerja di sektor informal, terutama buruh gendong dengan mengakui dan melindungi mereka melalui sebuah kebijakan.
2. Bagi aktivis Yasanti dan jaringan NGO agar lebih solid dan tetap melakukan pendampingan kepada buruh perempuan di sektor informal,

terutama buruh gendong. Selain itu juga diharapkan dapat menginisiasi dalam melakukan kajian lebih lanjut terkait pendataan buruh gendong di DIY. Mengingat data ataupun lembar kebijakan buruh gendong sangat penting untuk membuktikan keberadaan mereka kepada pemerintah.

3. Bagi buruh gendong dapat mengembangkan dan menguatkan kelompok (organisasi) dengan terus mengupayakan manajemen organisasi yang lebih baik lagi. Adanya tanggung jawab terhadap pembagian kerja dalam kelompok dan giat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok. Selain itu dapat mengelola dan/atau mendokumentasikan kegiatan-kegiatan melalui media social, contohnya dibuat facebook “Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong”. Hal tersebut merupakan alat dalam mengkampanyekan arah juang kelompok.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengkaji lebih dalam terkait dengan kesejahteraan buruh gendong yang tergabung dalam Paguyuban Sayuk Rukun DIY. Kesejahteraan buruh gendong dapat dukur menggunakan Teori BPSS (Biologis-Psikologis-Sosial-Spiritual).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2006.
- Amin Muftiyanah, dkk, *Perlawanan Buruh Perempuan: Pengalaman Yasanti dalam Mendampingi Buruh Perempuan*, cet. 1, Yogyakarta: Yayasan Annisa Swasti, 2011.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, April 2007.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, *Profil Pasar Kelas II dan III Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Disperindag, 2018.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Desember 1999.
- Hussaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Kedua*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Ihromi, T.O., *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Cet. 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Agustus 1995.

ILO, *Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi*, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2010.

Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*, Bandung: Yayasan AKATIGA, 2006.

Mansour Fakih, dkk, *Mengubah Kebijakan Publik*, Cet. Ke-5, Yogyakarta: Insist Press, Juli 2007.

Mansour Fakih, dkk, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*, Cet. 3, Yogyakarta: Insist, 2007.

Munir, *Gerakan Perlawanan Buruh: Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra reformasi*, Jawa Timur: Omah Munir, 2014.

Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Mei 2011.

Pratomo, Hadi, *Advokasi: Konsep, Teknik, dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali, 2015.

Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.

Sharma, Ritu R., *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*, Ed. 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Mei 2004.

Sigit Pamungkas, dkk, *Advokasi Berbasis Jejaring*, Yogyakarta, PolGov, 2010.

Sihite, Romany, *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan: suatu tinjauan berwawasan gender*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soetrisno, Loekman, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Penerbis Kanisius, 1997.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabet, 2008.

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafa'at, Rachmad, *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya: Strategi Buruh dalam Melakukan Advokasi*, Semarang: In-TRANS, 2008.

Valerie Miller dan Jane Covey, *Buku Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Bertindak, dan Refleksi*, Ed. 1, Penerjemah: Hermoyo Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Yasanti, *Profil Endong-Endong Pasar Beringharjo Jogjakarta*, Cet. 1, Yogyakarta, Yayasan Annisa Swasti, 2003.

Skripsi

Mutiara, Pradita Debby, *Responsivitas Gender dalam Proses Pemberdayaan oleh Yayasan Annisa Swasti: Studi pada Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong Pasar Beringharjo*, Tesis, Yogyakarta: Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, 2015.

Putri, Dian Buana, *Penguatan Kapasitas Buruh Gendong Melalui Sekolah Kepemimpinan di Yayasan Annisa Swasti (Yasanti)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya, UGM, 2015.

Rositadewi, Fitrayani Dian, *Membangun Kesetaraan Gender: Studi Kaus Empat Perempuan Buruh Gendong Pasar Giwangan dalam Rumah Tangga di*

Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya, UGM, 2017.

Sari, Isnia Latifah, *Pengorganisasian Buruh Gendong Perempuan Pasar Beringharjo Yogyakarta oleh Yayasan Annisa Swasti (Yasanti)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Artikel

Absor, M. Ulil, *Advokasi Penanganan Korban Trafficking Perempuan dan Anak: Lesson Learnt dalam Advokasi Kebijakan di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*, Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 2, Desember 2012.

Wibowo, Dwi Edi, *Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*, Jurnal Muwazah, Vol. 3, No. 1, Juli 2011.

Wawancara dan Dokumen

Dokumen Yasanti Tentang Sekolah Kepemimpinan Tahun 2015

Dokumen Yasanti Tentang Pendamping Lapangan Tahun 2016

Dokumen Yasanti Tentang Buruh Gendong Tahun 2019

Dokumen Yasanti Tahun 2019 Tentang Peserta BPJS Ketenagakerjaan Buruh Gendong Pasar Giwangan.

Dokumen Yasanti tentang struktur organisasi Yasanti periode 2016-2020.

Leaflet Yasanti Tahun 2016

Wawancara dengan Ibu Amin Muftiyanah, Direktur Eksekutif Yasanti pada hari Selasa, 27 Agustus 2019.

Wawancara dengan Ibu Bandiyah, Ketua 2 Paguyuban Sayuk Rukun Pasar Giwangan pada tanggal 2 September 2019.

Wawancara dengan Ibu Hikmah Diniah, Divisi Pendidikan, Kajian dan Advokasi Yasanti pada tanggal 21 November 2019.

Wawancara dengan Ibu Nur Hardini, bagian Administrasi Yasanti pada tanggal 23 Agustus 2019.

Wawancara dengan Ibu Rubiyah, Ketua 2 Paguyuban Sayuk Rukun DIY dan buruh gendong Pasar Giwangan pada hari Jum'at, 30 Agustus 2019.

Wawancara dengan Ibu Suratmi, Ketua 1 Paguyuban Sayuk Rukun Pasar Giwangan, tanggal 26 Januari, 11 Februari, dan 9 September 2019.

Wawancara dengan Ibu Umi Asih selaku Pendamping buruh gendong Pasar Giwangan di Yasanti pada tanggal 4 Februari, 29 Juli dan 4 September 2019.

Wawancara dengan Ibu Yantinem, Ketua 1 Paguyuban Sayuk Rukun DIY pada tanggal 2 September 2019.

Internet

Ariefana, Pebriansyah, Rubiyah: *Kisah Buruh Gendong Yogyakarta dan Ancaman Kekerasan Seksual*,

<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/wawancara/2019/02/07/144>

457/rubiyah-kisah-buruh-gendong-yogyakarta-dan-ancaman-kekerasan-

seksual diakses pada tanggal 4 April 2019.

Institute for Women's Empowerment, *WELDD (Women's Empowerment and Leadership Development for Democratisation)*, <https://iwe-women.org/weldd.php> diakses pada tanggal 3 November 2019.

Kadin Indonesia, *Membangun Kadin yang Efektif: Pedoman Advokasi Kebijakan*, dilihat pada laman www.kadin-indonesia.or.id pada tanggal 19 Februari 2019.

MAMPU, *Yayasan Annisa Swasti (Yasanti)*, di akses di pada <http://www.mampu.or.id/en/partners/yasanti-yayasan-annisa-swasti-2/> tanggal 29 Agustus 2019.

Maulidar, Indri, *Rubiah: Perempuan Kuat di Pasar Yogyakarta*, https://investigasi.tempo.co/perempuan-berdaya/tokoh_06.html di akses pada tanggal 4 April 2019.

Prasetyo, Bagus, *Menanti Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal*, dilihat melalui laman www.gresnews.com/berita/opini/99065-menanti-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-sektor-informal/ di akses pada tanggal 1 Maret 2019.

Yasanti, *Partners*, di akses pada www.Yasanti.or.id tanggal 29 Agustus 2019.

Yasanti, *Profil YASANTI-Yayasan Annisa Swasti*, di akses pada www.Yasanti.or.id/content hari Minggu, 7 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB.

Yasanti, *Tim Yasanti*, di akses pada www.Yasanti.or.id tanggal 15 Juli 2019.

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan



LAMPIRAN

1. Pertemuan Paguyuban Buruh Gendong



2. Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong dan pelatihan advokasi.





3. Aksi pada Peringatan Hari Besar (Hari buruh, HAM, HAP, Ultah Yasanti)



4. Ibu Rubiyah advokasi terkait pengakuan dan perlindungan buruh gendong di Gedung Agung DIY tahun 2015



5. Buruh gendong audiensi ke daerah asal yaitu Desa Ngreco dan Desa Karangmojo Kecamatan Weru Sukoharjo tahun 2019.



6. Buruh gendong audiensi ke daerah asal yaitu Desa Tuksono dan Desa Saalamrejo Kecamatan Sentolo Kulonprogo tahun 2019.



7. Diskusi Publik tentan Peran Buruh Gendong dalam Penguatan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Sentolo Kulonprogo tahun 2019.



8. Buruh gendong asal Kulonprogo bertemu dengan Bupati Kulonprogo tahun 2019.



9. Workshop Perlindungan bagi Buruh Gendong di Wisma Hotel Kulonprogo tahun 2019.



10. Buruh gendong dan JAMPI audiensi dengan Disnakertrans DIY tahun 2019.



11. Buruh gendong dan JAMPI dialog dengan Ibu Novi dari BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019.



12. Buruh gendong dan JAMPI bertemu dengan bapak Dede Yusuf DPR RI Komisi IX Tahun 2018.



13. Buruh gendong bertemu dengan Titiek Soeharto MPR RI



14. Buruh gendong dan JAMPI bertemu dengan DPRD DIY



15. Buruh gendong dan JAMPI bertemu dengan Dinas Ketenagakerjaan DIY



16. Diskusi terbuka terkait jaminan sosial, kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 (Narasumber Ibu Novi dari BPJS DIY, Ibu Sri Suryati dari Disnakertrans DIY, Ibu Amin dari Yasanti, Ibu Warisah perwakilan Pekerja Informal; dan MC Ibu Hikmah Diniah Koordinator JAMPI/dari Yasanti).



17. Pengakuan Paguyuban oleh Dinas Pasar Kota Yogyakarta dan peresmian shelter buruh gendong oleh Ibu Walikota tahun 2016.



18. Kegiatan senam buruh gendong Pasar Giwangan



19. Buruh gendong saat bekerja di Pasar Giwangan dan saat peneliti melakukan wawancara dengan informan.





20. Pemeriksaan kesehatan



Daftar Nama Informan

1. Amin Muftiyanah (Direktur Eksekutif Yasanti) diwawancarai pada hari Selasa, 27 Agustus 2019.
2. Umi Asih (Pendamping Lapangan Buruh Gendong Pasar Giwangan) diwawancarai pada hari Senin, 4 Februari 2019; hari Senin, 29 Juli 2019; dan hari Rabu, 4 September 2019.
3. Hikmah Diniah (Divisi Pendidikan, Kajian dan Advokasi) diwawancarai pada hari Kamis, 21 November 2019.
4. Nur Hardini (Bagian Administrasi Yasanti) diwawancarai pada hari Jum'at, 23 Agustus 2019.
5. Yantinem (Ketua 1 Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong DIY) pada hari Senin, 2 September 2019.
6. Rubiyah (Ketua 2 Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong DIY) pada hari Jum'at, 30 Agustus 2019.
7. Suratmi (Ketua 1 Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong Pasar Giwangan) pada hari Sabtu, 26 Januari 2019; dan hari Senin, 9 September 2019.
8. Bandiyah (Ketua 2 Paguyuban Sayuk Rukun Buruh Gendong Pasar Giwangan) pada hari Senin, 2 September 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGURUS YAYASAN ANNISA
SWASTI (YASANTI) TENTANG PROFIL DAN ADVOKASI HAK-HAK
DASAR BURUH GENDONG PASAR GIWANGAN**

Nama :

Jabatan :

Waktu Wawancara :

A. PERTANYAAN TERKAIT PROFIL YASANTI

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Yayasan Annisa Swasti?
2. Apakah tujuan diberdirikannya Yayasan Annisa Swasti?
3. Apakah Visi-Misi dari Yayasan Annisa Swasti?
4. Bagaimanakah dinamika struktur organisasi dari Yayasan Annisa Swasti?
5. Bagaimanakah status kelembagaan dari Yayasan Annisa Swasti?
6. Dimanakah wilayah kerja Yayasan Annisa Swasti?
7. Siapakah yang menjadi sasaran kerja dari Yayasan Annisa Swasti?
8. Bagaimanakah program kerja dari Yayasan Annisa Swasti?
9. Siapa sajakah buruh dampingan Yayasan Annisa Swasti?
10. Bagaimanakah cara Yayasan Annisa Swasti memperoleh dana (*fund rising*)?

**B. PERTANYAAN TERKAIT ADVOKASI PEMENUHAN HAK-HAK
DASAR BURUH GENDONG PASAR GIWANGAN**

1. Bagaimanakah awal mula Yasanti melakukan pendampingan kepada buruh gendong di Pasar giwangan?
2. Sejak tahun berapakah Yasanti melakukan pendampingan kepada buruh gendong di Pasar Giwangan?
3. Bagaimana cara Yasanti melakukan pendekatan/membangun hubungan baik kepada buruh gendong di Pasar Giwangan?
4. Apakah program yang pertama kali diadakan Yasanti terhadap buruh gendong Pasar Giwangan?
5. Apakah yang melatarbelakangi Yasanti melakukan pendampingan kepada buruh gendong di Pasar Giwangan?

6. Model advokasi seperti apakah yang dilakukan Yasanti dalam mendampingi buruh gendong di Pasar Giwangan?
7. Bagaimanakah keadaan atau persoalan-persoalan yang dialami oleh buruh gendong di Pasar Giwangan?
8. Adakah persoalan-persoalan buruh gendong yang sampai diperkarakan di pengadilan?
9. Buruh gendong belum diakui keberdaannya, pengakuan dalam bentuk seperti apakah yang diharapkan oleh Yasanti dan buruh gendong itu sendiri? Apakah pengakuan secara tertulis (kebijakan, peraturan-peraturan) atau sekedar pengakuan secara lisan?
10. Pengakuan dari siapa sajakah yang dibutuhkan oleh buruh gendong?
11. Seberapa penting pengakuan tersebut bagi buruh gendong? Apakah dampak dari diakuiinya buruh gendong sebagai pekerja?
12. Bagaimanakah perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh buruh gendong?
13. Siapakah yang seharusnya memberikan perlindungan kepada buruh gendong?
14. Bagaimana keterlibatan Yasanti dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan bagi buruh gendong? Apa peran dan kedudukannya?
15. Advokasi yang dilakukan Yasanti adalah advokasi kebijakan, bagaimanakah cara Yasanti dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan bagi buruh gendong?
16. Bagaimana strategi Yasanti dalam merubah cara berfikir atau menanamkan kesadaran mengenai hak-hak buruh gendong sebagai perempuan pekerja?
17. Bagaimana strategi Yasanti dalam meningkatkan atau menguatkan kapasitas buruh gendong?
18. Apa sajakah program-program yang diadakan Yasanti dalam rangka memperkuat posisi atau nilai tawar pada buruh gendong di Pasar Giwangan?

19. Bagaimana strategi Yasanti dalam menyatukan buruh gendong Pasar Giwangan ke dalam sebuah kelompok?
20. Adakah penelitian dan kajian kebijakan yang dilakukan Yasanti dan buruh gendong dalam rangka memperjuangkan pengakuan dan perlindungan buruh gendong?
21. Bagaimana strategi Yasanti dan/atau buruh gendong dalam membangun opini publik atau mempopulerkan isu advokasi kepada masyarakat luas atau pun institusi-institusi lain untuk memperoleh dukungan ?
22. Apakah Yasanti dan buruh gendong Pasar Giwangan membangun jaringan dan koalisi/berkonsolidasi dengan buruh gendong lainnya dan/atau pekerja informal lainnya?
23. Sebutkan apa saja jaringan tersebut dan jelaskan tujuan dan arah gerakannya?
24. Bagaimana strategi Yasanti dalam mempengaruhi tata laksana hukum (pemerintah, pejabat, dinas-dinas terkait dan sebagainya)?
25. Usaha-usaha apa sajakah yang telah dilakukan oleh Yasanti dan buruh gendong dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan bagi buruh gendong?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BURUH GENDONG PASAR
GIWANGAN SEKALIGUS *LEADER*/PERNGURUS PAGUYUBAN SAYUK
RUKUN**

Nama :

Jabatan :

Waktu Wawancara :

Pertanyaan :

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Pasar Giwangan?
2. Bagaimana sistem penataan pedagang dan/atau denah Pasar Giwangan?
3. Bagaimana karakteristik dari Pasar Giwangan?
4. Bagaimana sejarah kemunculan buruh gendong di Pasar Giwangan?
5. Mengapa ibu lebih memilih bekerja (*nggendong*) di Pasar Giwangan?
6. Berapakah jumlah buruh gendong yang kost dan *nglaju*? Berapakah pengeluaran perhari pada buruh gendong yang kost dan *nglaju*?
7. Untuk apakah penghasilan yang diperoleh dari hasil *nggendong*? Apakah untuk kebutuhan diri sendiri atau keluarga?
8. Di Pasar Giwangan, apa saja barang-barang yang digendong oleh buruh gendong? berapakah rata-rata beratnya dan jarak tempuh menggendong?
9. Adakah pembagian wilayah kerja pada buruh gendong di Pasar Giwangan?
10. Bagaimanakah cara buruh gendong memperoleh orderan barang yang akan di gendong? Ataukah dengan cara menawarkan diri? Atau dengan sistem langganan/borongan?
11. Apabila dengan sistem langganan/borongan, bagaimana sistem kerjanya? Apakah dengan cara berkelompok atau individual?
12. Apabila dengan cara menawarkan diri, apakah dengan cara berkelompok/individual?
13. Bagaimana sistem pengupahannya apabila berkelompok?
14. Bagaimana hubungan kerja pada buruh gendong dan penerima jasa?
15. Apakah ada hubungan kerja yang terikat, seperti juragan-buruh? Atau buruh gendong bebas menjajakan jasanya kepada siapa saja?

16. Apabila buruh gendong memiliki juragan, bagaimanakah sistem kontrak kerjanya? Adakah perjanjian tertulis?
17. Bagaimana pengupahannya, apakah diberikan perhari atau perbulan?
18. Bagaimana penetapan jam kerja pada buruh gendong yang memiliki juragan?
19. Apabila buruh gendong bekerja melebihi jam kerja yang telah disepakati, adakah tambahan upah yang diberikan juragan?
20. Adakah buruh gendong mendapatkan tunjangan kerja dari penerima jasa, seperti THR, bantuan sosial ?
21. Apakah permasalahan-permasalahan dari buruh gendong terkait dengan hak-haknya sebagai pekerja?
22. Apakah bentuk perlindungan yang diberikan dinas pasar kepada buruh gendong? fasilitas seperti apa saja yang dapat diakses oleh buruh gendong di Pasar Giwangan?
23. Bagaimanakah keterlibatan buruh gendong di dalam keluarga, tempat kerja, tempat tinggal (daerah asal dan/atau kost)?
24. Apakah buruh gendong dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan atau pengambilan keputusan di dalam keluarga, desa dan/atau pasar?
25. Apakah harapan dari para buruh gendong terkait dengan kerja layak?



UIN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email: fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

NO : B-1191/Un.02/DD/PP.01.2/06/2016

LARASTIYAN PERMATASARI

15250040

LULUS dengan Nilai 97 (A)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

Ujian sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Dekan



Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 01 Juni 2016

Ketua

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. MSI., MA., Ph.D

NIP. 19710919 199603 2 001

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

DEDIKATIF-INOVATIF

INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: C/N.02/L4/PM.03.2/6.25.10.9/2019

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Laras Tiyan Permatasari :

تاريخ الميلاد : ٣ أغسطس ١٩٩٧

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٣٠ أبريل ٢٠١٩، وحصلت
على درجة :

٤١	فهم المسموع
٤٤	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٦	فهم المقروء
٣٧٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

جوكجاكرتا ٣٠ أبريل ٢٠١٩

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٩١٥١٩٩٨.٣١٠.٥٥





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.10.104/2019

This is to certify that:

Name : **Laras Tiyan Permatasari**
Date of Birth : **August 03, 1997**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)
held on **July 12, 2019** by Center for Language Development of State Islamic
University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	40
Reading Comprehension	43
Total Score	413

Validity: 2 years since the certificate's issued

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, July 12, 2019
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Laras Tiyan Permatasari
NIM : 15250040
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	40	E
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Internet	70	C
5.	Total Nilai	75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 15 Mei 2019

Dr. Shofwatul'Uyun, S.T., M.Kom.

NIP. 19820511 200604 2 002



Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





UIN
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nomor: UIN.02/R.3/PM.03.2/4397/2015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Sertifikat

ditberikan kepada:

Nama : LARAS TIYAN PERMATASARI
NIM : 15250040
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2015/2016

Tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2015 (24 jam pelajaran)

Yogyakarta, 1 September 2015
a.n. Rektor



Dit: Sri Rulaini Dzuhayatin, M.A.
Yogyakarta 05/05/17 199003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**



SERTIFIKAT

Nomor: B-350.3/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.918/10/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga
memberikan sertifikat kepada:

Nama	Laras Tiyan Permata Sari
Tempat, dan Tanggal Lahir	Brabes, 03 Agustus 1997
Nomor Induk Mahasiswa	15250040
Fakultas	Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek,
Tahun Akademik 2017/2018 (Angkatan ke-96), di:

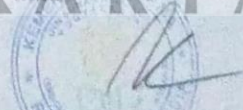
Lokasi	Serut 1, Serut
Kecamatan	Gedangsari
Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul
Propinsi	D.I. Yogyakarta

dari tanggal 04 Juli s.d. 31 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,29 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian
Munawar Syamsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 02 Oktober 2018
Ketua



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. 19720912 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. 0274 515856 Fax 0274 552230 Yogyakarta



Sertifikat

No: 255/Un.02/DD/PM.03.2/01/2019

Menyatakan Bahwa:

LARAS TIYAN PERMATASARI (15250040)

Telah Lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS)

Mikro, Mezzo, Makro berbasis lembaga dan berbasis masyarakat (Kuliah Kerja Nyata) dengan nilai kredit 12 sks,
dengan kompetensi Engagement, Assessment, Perencanaan, Intervensi Mikro, Intervensi Mezzo, Intervensi Makro dan Evaluasi Program



Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
NIP. 196003 198703 2 001

Yogyakarta, 25 Januari 2019
Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, S. IP, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008



LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJAAN SOSIAL INDONESIA
Indonesian Social Work Certification Board

Nomor : PS.G.00374.00.LSPS.19

Number : PS.G.00374.00.LSPS.19

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 03 HUK/2015

*Based on the Regulation of the Minister of Social Affairs of The Republic of Indonesia
Number 03 HUK/2015*

Memberikan
Provide

Sertifikat Kompetensi *Certificate of Competence*

Pekerja Sosial
Social Worker

Kepada
to

LARAS TIYAN PERMATASARI

Sertifikat berlaku selama 5 (Lima) tahun
Sejak 21 Oktober 2019 s.d 21 Oktober 2024

Certificate is valid for 5 (Five) years, since October 21, 2019 until October 21, 2024

Jakarta, 21 Oktober 2019
Jakarta, October 21, 2019

KETUA
LSPS
Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial

RUDI SAPRUDIN DARWIS





Sertifikat



Nomor: 172/Un.02/DirLabag/A.01/08/2019

Kami Pengelola Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada:

Laras Tiyan Permatasari

NIM : 15250040

yang telah aktif sebagai

SAHABAT MASJID

Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Periode 2017/2018

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

Mengetahui:

Direktur Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga



S. Ag. M. Hum.
110320117 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Laras Tiyan Permatasari
TTL : Brebes, 03 Agustus 1997
Alamat : Dukuh Krajan RT.09/RW.01 Desa
Adisana Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes Jawa Tengah
Nama Ayah : Abdullah Imam
Nama Ibu : Lisma Boti
Email : laraspermatasari97@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2001 – 2003 TK Aisyiyah Adisana
2003 – 2009 MI Muhammadiyah Adisana 02
2009 – 2012 SMP Bustanul Ulum NU Bumiayu
2012 – 2015 SMA Negeri 1 Bumiayu
2015 – 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

2017 – 2018 Sahabat Masjid Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta